

Percepat Proses Pembaruan Data Obat , BPJS Kesehatan Bangun Sinergi dengan LKPP

Jakarta (01/07/2020) – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program JKN-KIS, khususnya dalam hal pelayanan obat, BPJS Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pertukaran Data Obat Katalog Elektronik Nasional.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengatakan, sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemutakhiran data obat sesuai dengan katalog elektronik sehingga proses pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan klaim obat non kapitasi dan klaim obat di luar INA CBG's dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, terdapat obat-obatan yang dapat ditagihkan secara terpisah di luar paket kapitasi dan luar paket INA CBG. Pembayaran harga obat yang dapat ditagihkan di luar paket kapitasi dan di luar paket INA CBG adalah mengacu kepada harga dasar obat sesuai e-Katalog. Harga dasar obat dalam e-katalog tersebut dimasukkan ke dalam tabel referensi aplikasi Apotek Online BPJS Kesehatan sebagai sistem informasi manajemen penagihan obat luar paket.

"Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini adalah perubahan daftar e-Katalog obat pada website LKPP yang sangat dinamis, per propinsi dan belum ada informasi apabila terjadi perubahan data obat, sehingga menyulitkan BPJS Kesehatan karena harus melakukan pengecekan data obat satu per satu di setiap provinsi. Diharapkan adanya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan LKPP dapat menjaga validitas, dan mempercepat proses penyusunan tabel referensi aplikasi Apotek Online," katanya usai melakukan penandatanganan dengan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Salusra Widya, Rabu (01/07).

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pembaruan data obat katalog elektronik, pertukaran data obat katalog elektronik, serta penyediaan data utilisasi obat luar kapitasi dan luar INA CBG's. Dalam perjanjian kerja sama tersebut juga disebutkan, data yang akan diterima oleh BPJS Kesehatan adalah data obat e-katalog berikut perubahannya sebulan sekali secara elektronik. Sementara, data yang diterima oleh LKPP adalah data utilisasi obat luar paket yang terbatas untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi ketersediaan obat Katalog Elektronik dengan kementerian terkait.

"Kami menyambut baik kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai pengelola jaminan kesehatan penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan harus terus melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, termasuk dalam hal pembaruan data obat katalog elektronik. Harapan kami, sinergi ini dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan Program JKN-KIS ke depannya," ujar Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Salusra Widya.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Humas BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter : @BPJSKesehatanRI
Instagram : @bpjskesehatan_ri
Facebook : BPJS Kesehatan
Youtube : BPJS Kesehatan
Kompasiana : BPJS Kesehatan
Kaskus : bpjskesehatan

PRESS RELEASE**To Accelerate the Process of Drugs Data Updating, BPJS Kesehatan Builds Synergy with LKPP**

Jakarta (01/07/2020) - In order to improve the quality of the implementation of the JKN-KIS Program, particularly in the case of drugs services, BPJS Kesehatan signed a Cooperation Agreement with the Government Goods / Services Procurement Policy Agency (LKPP) on National Electronic Catalog Drugs Data Exchange.

Director of Health Care Service Insurance of BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady said, this synergy is expected to accelerate the process of updating drugs data in accordance with the electronic catalog so the process of filing bills and verification of claims for non-capitation drugs claims and drugs claims outside of INA CBG's can run more easily and smoothly.

Referring to the Minister of Health Regulation No. 52 of 2016 concerning Health Service Tariff Standards in the Implementation of Health Insurance, there are medicines that can be billed separately outside the capitation package and outside the INA CBG package. Payment of drugs prices that can be billed outside the capitation package and outside the INA CBG package is based on the basic price of the drugs according to the e-Catalog. The basic price of the drugs in the e-catalog is entered in BPJS Kesehatan Online Pharmacy application reference table as a drugs billing management information system outside the package.

"The current challenge of BPJS Kesehatan is changing the list of drugs e-catalogs on the LKPP website which is very dynamic, by province and there is no information when there is a change in drugs data, which make it difficult for BPJS Kesehatan because they have to check drugs data one by one in each province. It is expected that the collaboration between BPJS Kesehatan and LKPP can maintain validity, and speed up the process of preparing the Online Pharmacy application reference table," she said after signing with the Deputy of LKPP Information System Monitoring, Evaluation and Development of the LKPP Information System Salusra Widya, Wednesday (01/07).

The scope of the cooperation includes updating electronic catalog drugs data, exchanging electronic catalog drugs data, and providing data on drugs utilization outside capitation and outside INA CBG's. In the cooperation agreement also stated, the data that will be received by BPJS Kesehatan is the e-catalog drugs data along with the changes electronically once a month. Meanwhile, the data received by LKPP is limited for drugs utilization data outside the package for the purpose of planning and evaluating the availability of Electronic Catalog drugs with the relevant ministries.

"We welcome the collaboration with BPJS Kesehatan. As the manager of health insurance in Indonesia, BPJS Kesehatan must continue to make improvements in various aspects, including in terms of updating electronic catalog drugs data. We hope that this synergy can support the smooth running of the JKN-KIS Program to in front of him," said Deputy Director of Monitoring, Evaluation and Development of LKPP Information Systems Salusra Widya.
